BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah maka diperlukan sistem akuntansi yang baik, karena sistem akuntansi merupakan pendukung terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang accountable, dalam rangka mengelola dana dengan sistem desentralisasi secara transparan, efisien, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan, Adapun sistem akuntansi keuangan daerah yang berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelola keuangan pemerintah melalui penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan (Yayah Handani:2011).

Output dari akuntansi adalah laporan keuangan baik untuk pihak eksternal maupun internal, laporan tersebut tentunya melalui sebuah proses yang tidak sederhana, untuk menjamin bahwa proses tersebut dimulai dari penyediaan input yang baik dan benar, proses pencatatan hingga pelaporan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan memerlukan sebuah sistem dan prosedur, sistem dan prosedur yang dimaksud dalam bidang akuntansi disebut dengan sistem akuntansi atau sistem informasi akuntansi, dalam konteks organisasi sektor publik atau pemerintahan, akuntansi yang ditujukan untuk menghasilkan informasi keuangan bagi pengguna

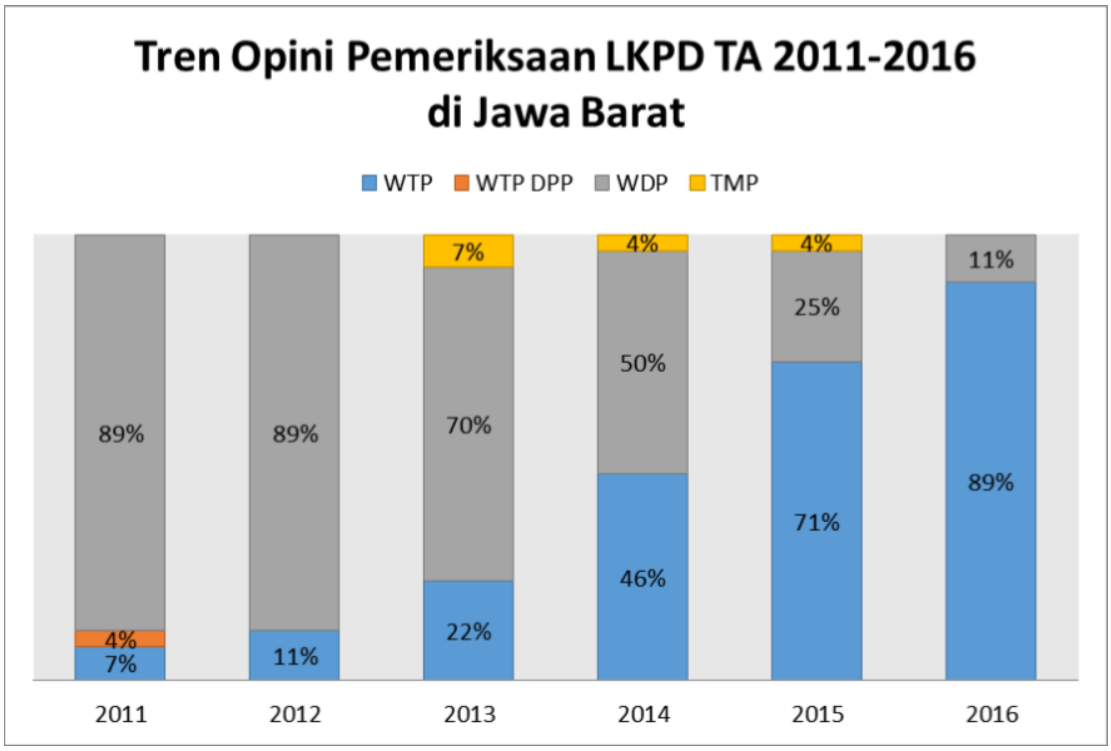
eksternal pemerintah menggunakan sistem akuntansi keuangan daerah (Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi, 2014:24).

Sitem Akuntansi Keuangan daerah terdapat serangkaian prosedur yang saling berhubungan dan disusun sesuai dengan suatu skema yang menyeluruh yang ditunjukan unttuk menghasilkan inforrmasi dalam bentuk laporan keuagan yang akan digunakan baik pihak intern maupun pihak ekstern pemerintah daerah unttuk mengambil keputusan ekonomi (Zayadi : 2010). Sistem tersebut merupakan Penerapan basis akrual yang memberikan hasil lebih baik dan memberikan keuntugan pemerintah dalam rangka akuntabilitas public (Halim dan kusufi 2012 : 52).

Dari data yang diperoleh dapat dikatakan bahwa kota Bandung mendapat 6 kali berturut-turut memperoleh opini WDP. Ketua BPK Jawa Barat Arman Syifa (2017) mengungkapkan bahwa Hasil pemeriksaan kami untuk laporan keuangan Pemkot Bandung tahun 2017 kami masih memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Ada beberapa hal yang kami nilai masih cukup material untuk kami jadikan sebagai pengecualian dalam opini BPK.

Gambar 1.1

Rekap Opini Hasil Pemeriksaan LKPD Entitas di Jawa Barat



Salah satu faktor yang menjadi pertimbangan BPK adalah pendataan aset pemerintah yang belum tuntas. Pada pemeriksaan tahun lalu, BPK menetapkan ada sejumlah aset senilai Rp 11 triliun yang harus didata ulang (Arman Syifa 2017).

Saat ini Sistem Pencatatan pada laporan keuangan di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bandung ini Masih dibilang Kurang baik dikarenakan adanya asset yang belum tercatat (Ari Bachdim 2018).

"Masalah sertifikat aset ada satu penilaian tahun lalu kita permasalahkan tidak sesuai prinsip standar akuntansi senilai Rp 11 triliun (Arman 2017). Yang kita nilai tidak sesuai standar, yang kemudian ditindak lanjuti pemda. Rp 9 triliun sudah bisa direvaluasi, dinilai kembali sesuai dengan NJOP sesuai dengan tahun neraca awal, sisanya Rp 2,5 triliun masih belum selesai. Yang lain masih ada aset yang tidak jelas ditemukan keterangan yang memadai aset itu ada dimana (Arman 2017).

Di Indonesia dalam rangka mewujudkan tata kelola yang baik (*good governance*), pemerintah daerah harus terus melakukan upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Dadang Suwanda dkk, 2017: 1). Pada dasarnya pemeintah daerah telah berupaya untuk menyusun laporan keuangan dengan system akuntnsi keuangan daerah yang diharapkan mampu mewujudkan tercapainya transparansi dan akuntabilitas (Wiwin Windasari 2017).

Menurut Madina Nustrat dan Timbul Pujianto (2018) Laporan Keuangan dikatakan buruk dikarenakan Sumber Daya manusia yang menangani Pengelolaan keuangan daerah tidak ditangtani oleh tenaga professional, Selain itu juga Pencatatan Aset daerah masih kurang diperhatikan oleh pemerintah daerah. Rusaknya neraca daerah adalah akibat asset asset yang tidak dicatat dengan baik.

Untuk memulihkan kondisi ekonomi, sosial dan politik adalah dengan mengembalikan kepercayaan rakyat kepada pemerintah dengan mencoba mewujudkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa atau yang dikenal dengan istilah *good governance*. Oleh karena itu tuntutan terhadap terwujudnya *good governance* (tata

kelola yang baik) sangat diperlukan terutama di instansi pemerintah. Format baru yang perlu dikembangkan dan ditetapkan oleh pemerintah daerah agar terciptanya pemerinttah yang bersih dan *Good Governan*ce adalah dengan cara adanya akuntabilitas dari penyelenggaraan pemerintah (Dita, 2015).

Upaya ini juga didukung oleh banyak pihak baik pemerintah sendiri sebagai lembaga eksekutif, DPR sebagai lembaga legislatif, pers dan juga oleh lembaga-lembaga swadaya masyarakat. Penetapan UU No. 22 tahun 1999 dan Undang-Undang No. 25 tahun 1999 oleh pemerintah, mengenai Pemerintah Daerah dan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, berimplikasi pada tuntutan otonomi yang lebih luas dan akuntabilitas publik yang nyata yang harus diberikan kepada pemerintah daerah (Zayadi 2010).

Selanjutnya, Undang-Undang ini diganti dan disempurnakan dengan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 dan Undang-Undang No. 33 tahun 2004. Kedua undang-undang tersebut telah merubah akuntabilitas atau pertanggungjawaban pemerintah daerah dari pertanggungjawaban vertikal (kepada pemerintah pusat) ke pertanggungjawaban horisontal (kepada masyarakat melalui DPRD). Pada intinya semua peraturan tersebut menginginkan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah (Zayadi 2010).

Pada 30 mei 2018 dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Bandung soroti kinerja pejabat di enam satuan kinerja Pemerintah Daerah (SKPD) Pememerintah kota Bandung Diantaranya Dinas Bima marga dan Pengairan, Dinas

perhubungan, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappenda), Badan Peridinan dan pelayanan terpadu (BPPT), Bagian hokum, dan inspektorat (Erwan Setiawan 2018). Dalam Laporan keuangan pertanggungjawaban (LKPJ) dewan perwakilan rakyat daerah menyoroti rendahnya kualitas pembangunan dan kelemahan perencanaan dalam menetapkan target target capaian kinerja, karena kegagalan dalam perencanaan sama halnya denga merencanakan kegagalan (Erwan Setiawan 2018)

Keberadaan lembaga lembaga pengawasan saat ini dinilai seperti kotak pos saja, Berbagai lmbaga yang fungsinya hanya untuk menerima pengaduan sehingga para pegawainya seperti mendapatkan gaji buta, pengawasan atasan yang lemah terhadap bawahan, Akhirnya integritas bawahan merosot. Hukum yang menjadi alat kekuasaan juga menjadi factor tersebut (Arita Archadia 2018).

Pengelolaan laporan pemerintah daerah yang berakuntabilitas, tidak bisa lepas dari anggaran pemerintah daerah. Anggaran diperlukan dalam pengelolaan sumber daya tersebut dengan baik untuk mencapai kinerja yang diharapkan oleh masyarakat dan untuk menciptakan akuntabilitas terhadap masyarakat (Mamudi 2012).

Salah satu bagian dari akuntabilitas yang dapat diciptakan oleh aparatur pemerintah daerah adalah dengan adanya akuntabilitas keuangan. Akuntabilitas keuangan akan tercapai dengan dilaksanakan sistem akuntansi keuangan daerah yang baru dan sesuai dengan paradigma *good governance.* Perubahan paradigma pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu tuntutan yang perlu direspon oleh pemearintah, karena perubahan tersebut mengakibatkan manajemen keuangan semakin

kompleks. Terkait reformasi pengelolaan keuangan daerah adalah adanya penggunaan akuntansi dalam pengelolaan keuangan daerah (Elvira Zayn 2010). Penggunaan akuntansi dalam pengelolaan keuangan daerah diperlukan untuk menghasilkan laporan keuangan yang dapat diaudit (auditable) sehingga memudahkan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam hal transparansi pengelolaan keuangan (Daeng M. Nazier, 2006).

Akuntabilitas melalui anggaran meliputi penyusunan anggaran sampai dengan pelaporan anggaran. Indrawati Yuhertina dalam Elvira Zeyn (2010) menyebutkan "Laporan keuangan merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik dan merupakan salah satu alat ukur kinerja finansial pemerintah daerah". Akuntabilitas keuangan mengharuskan pemerintah daerah menyusun laporan

Untuk itu Fenomena yang terjadi dalam pengembangan sektor public di Indonesia ini adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga public, baik dipusatkan ataupun daerah, jadi akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertaggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan asaran yang teahh ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban secara periodic (Stanbury 2003).

Pada Laporan Pertanggungjawaban merupakan sarana utama akuntabilitas publik yang diharapkan dapat mengungkapkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi suatu organisasi secara transparan, akuntabel dan melibatkan partisipasi masyarakat (*good governance*).(Muhammad Ali 2017)

Menurut Fera Tresnawati & R.Nelly Nur Apandi (2016) bahwa tingkat pengungkapan laporan keuangan tidak mampu memoderasi hubungan antara tindak lanjut hasil penerimaan dan kualitas laporan keuangan, dan lebih lanjut lagi bahwa tingkat pengungkapan bukan pertimbangan utama auditor dalam menentukan kewajaran laporan keuangan.

Berdasarkan dari permasalahan diatas, penulis tertarik untuk mengetahui seberapa efektif dan berperpengaruhnya penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan *Good Governance* terhadap akuntabilitas keuangan, maka penulis mengambil penelitian denggan judul "**Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan *Good Governance* terhadap Akuntabilitas Keuangan.**

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

1. Sistem Pencatatan pada laporan keuangan di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bandung ini Masih dibilang Kurang baik dikarenakan adanya asset yang belum tercatat
2. Rendahnya kualitas pembangunan dan kelemahan perencanaan dalam menetapkan target target capaian kinerja, karena kegagalan dalam perencanaan

3. Pengawasan atasan yang lemah terhadap bawahan. Akhirnya integritas bawahan merosot. Hukum yang menjadi alat kekuasaan juga menjadi factor tersebut.

1.2.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan larar belakang permasalahan yang telah dikemukakan bahwa untuk menilai akuntabilitas keuangan maka pemerintah daerah dituntut untuk menerapkan *Good Governance* dan system akuntansi keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Pemerintahan. Maka penulis merumuuskan pernyataan penelitian sebagai berikut :

1) Seberapa besar pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas keuangan pemerintah kota Bandung.
2) Seberapa besar pengaruh penerapan *Good Governance* dan akuntabilitas keuangan kota Bandung.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud Penelitian ini adalah untuk mencari kebenaran atas pengaruh penerapan system akuntansi keuangan daerah dan penerapan *good governance* terhadap akuntabilitas keuangan.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam peneitian ini adalah sebagai berikut :

1) Untuk Mengetahui mengenai besarnya pengaruh penerapan system akuntansi keuangan daerah pada akuntabilitas keuangan di kota Bandung.
2) Untuk mengetahui besarnya pengaruh Penerapan *Good Governance* pada akuntabilitas keuangan di kota Bandung.

1.4. Kegunaan penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

Kegunaan penelitian ini adalah untuk memecahkan masalah-masalah yang terjadi pada kinerja Instansi Pemerintah, masalah-masalah pada penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan *Good Governance* Pada Akuntabilitas keuangan..

1.4.2 Kegunaan Akademis

Hasil penelitian ini digunakan sebagai pengembangan ilmu melalui pengujian empiris dari konsep-konsep yang telah diharapkan dapat membuktikan kembali teori-teori penelitian terdahulu mengenai:

a) Pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja Instansi Pemerintah.
b) Pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja Instansi Pemerintah.

1.5. Lokasi dan Waktu Penelitian

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, maka penulis melakukan pengamatan dan obeservasi pada dinas pemerintahan kota Bandung pada bulan april 2018.